

## **Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)**

**Agung Nur Cahyono<sup>1</sup>, M. Sati Lubis<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Arifin Simanjuntak<sup>4</sup>,  
Gusti Bagus Oka Tapayasa<sup>5</sup>**

Sekolah Staf Dan Komando TNI, Indonesia

email: [agung173nc@gmail.com](mailto:agung173nc@gmail.com), [mloebiz@gmail.com](mailto:mloebiz@gmail.com), [muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com),  
[arifin.s2806@gmail.com](mailto:arifin.s2806@gmail.com), [Okatapayasa940@gmail.com](mailto:Okatapayasa940@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pelaporan media terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam konteks konflik bersenjata memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media, baik tradisional maupun digital, dalam menyampaikan informasi terkait pelanggaran hukum humaniter, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam pelaporan dan dampaknya terhadap akuntabilitas global. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis pelaporan media internasional mengenai pelanggaran hukum humaniter di dua zona konflik utama, yaitu Suriah dan Palestina. Data dikumpulkan melalui analisis konten dari berbagai sumber media, termasuk media tradisional dan platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan besar terkait bias politik dan disinformasi, media tetap berfungsi sebagai alat utama dalam memperjuangkan akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum humaniter. Media sosial memainkan peran penting dalam memperluas akses informasi dan mempercepat distribusi berita mengenai pelanggaran tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan etika jurnalistik dan verifikasi informasi tetap ada, media, terutama media sosial, memiliki potensi besar dalam mendokumentasikan dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan jurnalisme berbasis etika dan akurasi untuk meningkatkan peran media dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter serta untuk memperbaiki persepsi publik global mengenai isu tersebut.

**Kata Kunci:** media, hukum humaniter, konflik bersenjata, pelaporan media, media sosial, disinformasi, akuntabilitas global

### **ABSTRACT**

*Media reporting on violations of humanitarian law in the context of armed conflicts plays a crucial role in shaping public opinion and influencing international policies. This study aims to examine the role of both traditional and digital media in reporting violations of humanitarian law, focusing on the challenges faced in reporting and their impact on global accountability. The research uses a comparative approach by analyzing international media reporting on humanitarian law violations in two major conflict zones, Syria and Palestine. Data is collected through content analysis of various media sources, including traditional media and social media platforms. The findings reveal that, despite significant challenges related to political bias and misinformation, media remains a primary tool in advocating for accountability for violations of humanitarian law. Social media plays a crucial role in expanding access to information and speeding up the distribution of news about such violations. The study concludes that although ethical journalism challenges and information verification remain, media, particularly social media, holds significant potential in documenting and reporting violations of humanitarian law. The implications of this research emphasize the need for strengthening ethics-based journalism and*

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

*accuracy to enhance the role of media in monitoring and reporting violations of humanitarian law, as well as improving global public perception of the issue.*

**Keywords:** *media, humanitarian law, armed conflict, media reporting, social media, disinformation, global accountability*

### PENDAHULUAN

Konflik bersenjata modern, seperti yang terjadi di Suriah dan Palestina, telah membawa korban jiwa dalam jumlah besar serta kehancuran luas terhadap infrastruktur sipil. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti penargetan warga sipil, fasilitas kesehatan, dan penggunaan senjata terlarang, menjadi isu yang krusial untuk didokumentasikan dan direspons oleh komunitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Gutman (1998), "The media's role in spotlighting violations of international humanitarian law is vital, but its effectiveness depends on accuracy, independence, and ethical standards." Media dapat menjadi alat utama dalam membongkar pelanggaran hukum humaniter, kekuatannya sangat bergantung pada kualitas dan integritas jurnalisme itu sendiri. Pentingnya kualitas dan integritas media dalam konteks pelaporan konflik bersenjata dan pelanggaran hukum humaniter. Salah satu alat penting dalam menciptakan kesadaran dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Tusa et al. (2022), "*Fear for personal safety can influence the daily work of journalists, affecting their integrity when publishing stories that may impact interest groups or centres of power.*" Menyoroti betapa kondisi kerja yang tidak aman di zona konflik dapat menekan integritas jurnalis dan membatasi peliputan kritis terhadap kekuasaan. ini menggambarkan dilema yang dihadapi jurnalis dalam pelaporan konflik bersenjata di wilayah rawan pelanggaran hukum humaniter.

Sebagaimana dijelaskan oleh Robinson (2000), "*Media can influence foreign policy by shaping public opinion during humanitarian crises, as was evident in the interventions.*" Memperkuat argumen bahwa media tidak hanya mendokumentasikan konflik, tetapi juga berperan dalam memengaruhi arah kebijakan internasional melalui pembentukan opini publik. Media memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik, menekan pengambil kebijakan internasional, serta membuka ruang untuk dialog dan intervensi kemanusiaan. Di sisi lain, jurnalis yang melaporkan konflik menghadapi bahaya besar: ancaman fisik, penangkapan, penyensoran, hingga manipulasi informasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Lustgarten & Debrix (2005), "*As supposedly objective mediators, the media have a responsibility to report on human rights and humanitarian law violations, even when humanitarian intervention forces the so-called 'good guys'—are directly responsible.*" Pernyataan ini menekankan bahwa media tidak hanya mencerminkan kekejaman yang terjadi, tetapi juga berperan dalam membentuk konsekuensi politik dari pelanggaran tersebut dengan memengaruhi opini publik

dan kebijakan pemerintah, bahkan terhadap aktor yang secara naratif dianggap “pihak yang baik.” Bahwa media bukan hanya sekadar pelapor pasif, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk konsekuensi politik dari pelanggaran hukum humaniter.

Dalam konflik Suriah, misalnya, banyak jurnalis independen menjadi korban pembunuhan atau penahanan oleh kelompok bersenjata ((RSF), 2024). Sementara itu, di Palestina, terutama selama eskalasi militer di Jalur Gaza, pelaporan pelanggaran seringkali diwarnai polarisasi narasi dan perang informasi antara kubu pro dan kontra terhadap Israel (Suwarno & Sahayu, 2019), baik media nasional maupun internasional sering kali memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pihak yang lebih disorot dalam konflik tersebut. Mereka menyatakan bahwa "baik The Jakarta Post maupun *The New York Times* memiliki kesamaan, seolah lebih memihak Palestina sebagai korban konflik daripada Israel sebagai negara pelaku kejahatan perang". Perbedaan representasi ini menunjukkan bagaimana media dapat memengaruhi narasi yang berkembang di kalangan pembaca. Pemilihan kata dan framing yang digunakan oleh jurnalis, serta keberpihakan yang tampak dalam pelaporan, dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap suatu konflik (Suwarno & Sahayu, 2019). Dalam konteks inilah, penting untuk memahami media baik tradisional maupun digital berkontribusi dalam menyampaikan pelanggaran hukum humaniter dan mendorong akuntabilitas.

Media memiliki peran sebagai penjaga demokrasi dan akuntabilitas, termasuk dalam konteks pelanggaran hukum humaniter. Seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim et al. (2025), "*Media play a crucial role in constructing narratives and shaping public interpretations of global crises, particularly in protracted geopolitical conflicts such as the Russia-Ukraine war.*" Kutipan ini menyoroti bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap konflik dan pada akhirnya dapat memengaruhi tanggapan moral serta kebijakan internasional terhadap pelanggaran hukum humaniter. Hal ini menegaskan bahwa peliputan perang memiliki peran vital dalam membentuk pemahaman publik serta memengaruhi respons moral dan politik terhadap krisis kemanusiaan. Laporan media tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga dapat menggerakkan opini publik dan mendorong tindakan komunitas internasional dalam merespons pelanggaran hukum humaniter. Dalam konteks konflik bersenjata, pelaporan media berperan penting dalam mengungkap pelanggaran hukum dan membangun tekanan politik terhadap aktor yang bertanggung jawab. Bahkan, jurnalis seringkali menjadi satu-satunya sumber independen yang mampu mendokumentasikan kejahatan perang secara langsung di lapangan.

Menurut Chouliaraki (2009), "*The visual representation of suffering in the media does not merely evoke empathy but also shapes the ways in which we come to understand and respond to humanitarian crises, both morally and politically.*" Kutipan ini menyoroti bagaimana media tidak hanya menyampaikan penderitaan, tetapi juga mempengaruhi keterlibatan moral dan respons politik masyarakat

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

terhadap krisis kemanusiaan melalui cara penderitaan tersebut dibingkai secara visual. Visualisasi tersebut mampu menjembatani jarak emosional antara audiens global dan penderitaan yang dialami oleh korban konflik. Namun demikian, tantangan muncul ketika narasi media dalam pelaporan konflik bersenjata mengalami politisasi oleh aktor negara maupun non-negara. Hal ini terlihat dalam kasus konflik di Palestina dan Suriah, di mana representasi media kerap dipengaruhi oleh agenda tertentu. Baron (2006) menyoroti permasalahan ini dengan menyatakan bahwa media internasional sering kali menunjukkan bias sebagai akibat dari tekanan editorial, kepentingan ekonomi, atau pertimbangan politik negara asal. *"Media bias can arise from private information obtained by journalists through their investigation and persist despite profit orientation and competition among news organizations."* Ia menambahkan, *"Bias has two effects on the demand for news. First, rational citizens are more skeptical of potentially biased news and therefore rely on it less in making individual decisions. Second, bias makes some stories more likely than others."* Bias media dapat bertahan karena preferensi dan tekanan internal dalam organisasi media, yang berdampak langsung pada framing informasi serta pola konsumsi berita masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun media memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran dan respons global terhadap konflik, independensi dan objektivitas tetap menjadi tantangan utama dalam praktik jurnalisme internasional.

Perkembangan teknologi komunikasi juga memperluas peran media. Media sosial memungkinkan individu dan organisasi non-pemerintah untuk menyebarkan informasi pelanggaran hukum humaniter secara *cepat dan luas*. Namun, seperti disoroti oleh Peralta García & Ouariachi (2021), *"The urgency of this study is underscored by the challenges posed by misinformation on social media platforms... The 'digital infodemic' and rapid spread of misinformation through social media further complicate efforts to build trust."* Bahwa selama krisis kemanusiaan, penyebaran misinformasi melalui media sosial bukan hanya menghambat respons publik yang tepat, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan terhadap sumber informasi resmi. media sosial juga membuka ruang besar bagi disinformasi, propaganda, dan misrepresentasi konflik.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah mengkaji hubungan antara media dan pelaporan pelanggaran hukum humaniter dalam berbagai konteks konflik bersenjata. Salah satu penelitian penting yang dilakukan oleh Gutman (1998) menyoroti peran media dalam mengungkap pelanggaran hukum humaniter internasional dan bagaimana media dapat meningkatkan kesadaran publik serta menekan tindakan internasional terhadap pelaku pelanggaran. Gutman (1998) menjelaskan bahwa media yang memiliki akurasi, independensi, dan standar etika yang tinggi memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter tidak luput dari perhatian dunia internasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa efektivitas media dalam pelaporan sangat bergantung pada

ketepatan informasi dan keberanian jurnalis dalam menghadapi risiko yang ada di zona konflik.

Studi lain yang dilakukan oleh Tusa et al. (2022) mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi oleh jurnalis di zona konflik, termasuk ancaman terhadap keselamatan pribadi mereka dan tekanan untuk mempengaruhi liputan media demi kepentingan kelompok tertentu. Tusa et al. menyoroti bahwa meskipun media memiliki peran vital dalam mengungkap pelanggaran hukum humaniter, keberpihakan yang mungkin terjadi akibat ketakutan terhadap keselamatan dapat menurunkan integritas jurnalis. Penelitian ini mengungkapkan dilema yang sangat relevan bagi jurnalis yang melaporkan pelanggaran hukum humaniter, terutama di wilayah yang rentan terhadap kontrol politik dan tekanan ekonomi.

Meskipun banyak penelitian telah membahas hukum perang dan etika jurnalistik secara terpisah, studi komparatif yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam konteks konflik Suriah dan Palestina masih sangat terbatas. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana media internasional menghadapi dilema etika saat melaporkan pelanggaran hukum humaniter dalam dua situasi geopolitik yang berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran media internasional dalam melaporkan pelanggaran hukum humaniter pada konflik bersenjata di Suriah dan Palestina, serta untuk mengidentifikasi tantangan etika jurnalistik yang dihadapi dalam konteks tersebut. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh media dalam membentuk opini publik global tentang konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia, serta mengidentifikasi bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dalam mengungkapkan pelanggaran.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran media dalam menyampaikan pelanggaran hukum humaniter, dengan fokus pada dua kasus konflik bersenjata: Suriah dan Palestina. Pendekatan ini dipilih sebagaimana dinyatakan oleh Baker (2002), *"The portrayal of humanitarian violations in media can drive international attention, yet it is essential to verify the accuracy of these reports to avoid misinformation and political manipulation."* Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi informasi dalam pemberitaan pelanggaran hukum humaniter untuk memastikan integritas dan akurasi laporan yang disebarkan kepada publik.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana dikembangkan oleh Creswell (2014). Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata, khususnya dalam merepresentasikan pelanggaran hukum humaniter di dua wilayah konflik: Suriah dan Palestina. Kedua konflik ini dipilih karena masing-masing mencerminkan dinamika pelanggaran

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

hukum dalam konteks geopolitik yang berbeda. Konflik Suriah, sebagai perang saudara, melibatkan kompleksitas aktor lokal dan internasional, sementara konflik Palestina mencerminkan perjuangan melawan pendudukan dengan tekanan politik global yang signifikan. Dalam penelitian ini, pemilihan kasus dilakukan melalui *purposeful sampling* untuk memperoleh informasi yang relevan dan bermakna. Media diposisikan sebagai aktor sosial aktif yang membentuk narasi konflik, bukan sekadar penyampai informasi.

Sumber data mencakup artikel dan laporan berita dari media internasional seperti Al Jazeera dan BBC, laporan dari organisasi non-pemerintah seperti Amnesty International, serta studi akademik dari jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi digital, mengikuti langkah sistematis yang mencakup identifikasi dokumen, pengelompokan data, dan pencatatan dokumen. Analisis data mengikuti prinsip analisis tematik dengan proses pengkodean data ke dalam tema utama. Langkah-langkah analisis meliputi membaca data secara menyeluruh, melakukan koding awal, dan kategorisasi tema berdasarkan konteks lokal versus internasional. Reflektivitas peneliti dijaga melalui triangulasi sumber dan diskusi temuan dengan ahli. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang tantangan etika jurnalistik dalam pelaporan media internasional di dua situasi konflik yang berbeda.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kasus Suriah: Media sebagai Sumber Utama Dokumentasi Pelanggaran**

Konflik Suriah merupakan salah satu contoh nyata eskalasi pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konteks perang modern. Sebagaimana Laporan dari Syrian American Medical Society (2015) mencatat bahwa "Since the conflict in Syria began, there have been horrific violations of humanitarian and human rights law, including the systematic use of chemical weapons. This report documents 161 chemical attacks from the beginning of the conflict through 2015, resulting in at least 1,491 deaths and 14,581 injuries due to chemical exposure." Fakta ini memperkuat argumen bahwa konflik Suriah tidak hanya brutal, tetapi juga mencerminkan pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional yang harus mendapat perhatian global melalui pelaporan media yang akurat dan bertanggung jawab. Pernyataan ini menyoroti betapa kompleks dan seriusnya dampak konflik tersebut, yang tidak hanya menyebabkan krisis kemanusiaan berskala besar, tetapi juga mencerminkan pelanggaran sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter. Serangan terhadap fasilitas medis, penggunaan senjata kimia, serta penargetan terhadap warga sipil merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang secara jelas dilarang dalam konvensi internasional, dan menunjukkan perlunya pengawasan serta tindakan yang lebih kuat dari komunitas global.

Dalam konteks ini, Media memiliki peran yang semakin krusial dalam konteks pelaporan konflik bersenjata, khususnya dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Sebagaimana

Sejak dimulainya konflik Suriah pada 2011, Video daring telah menjadi alat yang sangat penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman yang terjadi di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Meis (2022), "Since the onset of the Syrian conflict (2011 to present), online video has played a pivotal role in documenting atrocities and human rights violations. Syrian civilians and activists protesting for civil and human rights have taken advantage of the opportunity to record their individual perspectives on events within Syria and publish them with the help of social media and mobile phones" Warga sipil dan aktivis di Suriah, yang sering kali berada di garis depan peristiwa tersebut, telah memanfaatkan teknologi ponsel dan platform media sosial untuk merekam dan membagikan perspektif mereka, memberikan bukti visual yang kuat mengenai kondisi yang terjadi di negara tersebut. Video-video ini tidak hanya menjadi arsip digital yang penting, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi komunitas internasional dan mengadvokasi keadilan bagi korban kekerasan.

Media internasional memainkan peran sentral dalam membentuk narasi global mengenai konflik dan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Media internasional telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran global mengenai penderitaan warga sipil di Suriah, terutama melalui berbagai bentuk pelaporan inovatif yang mencakup jurnalisme realitas virtual dan permainan berita. Seperti yang diungkapkan oleh (Hammond et al., 2019), "Since 2011, international media have extensively highlighted the suffering of civilians in the ongoing war in Syria, including through innovative forms of reporting such as virtual reality journalism and news games". Penggunaan teknologi ini memungkinkan audiens untuk merasakan pengalaman langsung dari situasi yang dihadapi oleh warga sipil, memberikan dimensi baru dalam cara media mengkomunikasikan konflik dan krisis kemanusiaan. Selain itu, pendekatan ini juga memperluas batasan tradisional jurnalisme dan mendorong keterlibatan lebih dalam dari audiens global untuk memahami dan merespons krisis kemanusiaan di Suriah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai pelapor peristiwa, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini publik dan kesadaran global. Dalam kasus Suriah, media internasional telah menjadi instrumen penting dalam mengungkap kekejaman yang dilakukan oleh rezim Assad serta keterlibatan militer Rusia, khususnya melalui peliputan intens atas pengepungan Aleppo dan Ghouta. Pelaporan tersebut tidak hanya menginformasikan publik dunia, tetapi juga membangun tekanan moral dan politik terhadap para pelaku pelanggaran hukum humaniter.

Media memiliki peran yang semakin vital dalam mendukung proses dokumentasi pelanggaran hukum humaniter, tidak hanya sebagai pelapor peristiwa tetapi juga sebagai sumber bukti sekunder yang kredibel. Sebagaimana ditegaskan oleh Syrian Network for Human Rights (SNHR) (2021), "The SNHR relies on various sources, including open-source media reports, to corroborate incidents of human rights violations, recognizing media coverage as a vital component of the

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

documentation process." Pernyataan ini menegaskan bahwa laporan media terbuka baik berupa teks, gambar, maupun video berfungsi sebagai komponen krusial dalam memverifikasi dan menguatkan temuan lapangan. Dengan mengombinasikan data dari berbagai saluran media, lembaga pemantau seperti SNHR dapat menyusun rekonstruksi peristiwa yang lebih komprehensif dan akurat, sehingga memperkuat upaya akuntabilitas internasional terhadap pelaku pelanggaran.

Namun, media juga menghadapi dilema jurnalis yang melaporkan dari zona konflik menghadapi berbagai risiko yang menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan secara bebas dan akurat. Seperti yang disoroti oleh UNESCO (2024), "Journalists reporting from crisis- and conflict-zones face severe threats in carrying out their critical work. Media infrastructure is often damaged or destroyed, and journalists face physical attacks, detention, equipment confiscation or denial of access to reporting sites. Many are forced to flee or cease their work, risking turning conflict areas into 'zones of silence.'" Ancaman-ancaman ini tidak hanya membahayakan nyawa jurnalis, tetapi juga berkontribusi pada erosi kebebasan pers di wilayah konflik, yang membuat lebih sulit bagi komunitas internasional untuk tetap mendapatkan informasi mengenai krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, media Rusia seperti RT dan Sputnik cenderung menyajikan narasi yang kontras, menggambarkan tindakan militer sebagai bagian dari "perang melawan terorisme." Seperti Dalam analisis media tentang keterlibatan militer Rusia di Suriah, Sputnik memainkan peran penting dalam membingkai narasi konflik tersebut Cesario, K., & de Archellie, R. (2020) mencatat bahwa, "This article examines how Sputnik uses framing to depict Russia's military involvement in Syria as part of a legitimate war against terrorism, supporting the Russian government's narrative." Dengan menggunakan framing ini, Sputnik berusaha menggambarkan keterlibatan Rusia sebagai bagian dari perang sah melawan terorisme, yang sejalan dengan kebijakan luar negeri pemerintah Rusia. Teknik framing ini menunjukkan bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang peran negara besar dalam konflik internasional dan mendukung legitimasi tindakan militer di mata audiens global. Ini menciptakan fragmentasi informasi dan memperlihatkan bahwa media tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai alat geopolitik.

### **Kasus Palestina: Polarisasi Narasi dan Pengaruh Opini Publik**

Dalam konteks Palestina, khususnya di Jalur Gaza, media internasional memainkan peran besar dalam membentuk persepsi terhadap konflik Israel-Palestina. Sebagaimana laporan tersebut menunjukkan bagaimana serangan terhadap fasilitas sipil oleh Israel selama eskalasi militer mendapatkan sorotan besar dari media, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, media internasional memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi global tentang

dinamika konflik tersebut. Penelitian Ukka (2023) mengungkapkan bahwa "the international media online journalism conflict report is propaganda of foreign politics, and the present and future relationship between Israel and Palestine can be shaped by Al Jazeera through its online journalism." (Ukka, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan langsung antara pelaporan media dan eskalasi konflik mungkin tidak selalu signifikan, pengaruh politik luar negeri terhadap narasi yang dibangun oleh media internasional, seperti Al Jazeera, memiliki dampak yang kuat. Dengan membingkai informasi sesuai dengan agenda politik tertentu, media dapat membentuk hubungan masa depan antara Israel dan Palestina, yang pada gilirannya akan mempengaruhi opini publik global dan kebijakan internasional terkait konflik tersebut. Hal ini relevan dengan analisis polarisasi narasi, di mana framing media mempengaruhi bagaimana publik melihat peristiwa dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Media sering kali dikritik karena ketidakseimbangan dalam pelaporan konflik bersenjata, terutama terkait dengan cara mereka menggambarkan perbedaan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. Beberapa studi menunjukkan bahwa media Barat sering kali menggunakan istilah-istilah yang memperhalus eskalasi agresi, seperti "clashes" atau "conflict", tanpa menyoroti ketimpangan kekuatan militer antara pihak yang terlibat. Seib (2019) menulis, "Western media outlets often use terms like 'clashes' or 'conflict' to downplay the disparity in military power between the Israeli and Palestinian sides." Pernyataan ini menggambarkan bagaimana istilah yang digunakan media dapat mengaburkan realitas ketidakseimbangan kekuatan yang ada, yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap peristiwa tersebut. Penggunaan bahasa yang lebih netral atau ambigu ini sering kali mengurangi urgensi moral dalam merespons pelanggaran yang terjadi, sehingga memperlihatkan ketidakadilan dalam representasi media terhadap pihak yang lebih lemah.

Media sosial menjadi medan baru dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi dan hukum humaniter. Warga Palestina menggunakan Twitter, TikTok, dan Instagram untuk menyampaikan video langsung dari lokasi serangan, yang sering kali tidak muncul dalam laporan media arus utama. Dalam konteks konflik Palestina, media sosial telah menjadi alat penting bagi aktivis untuk menantang narasi dominan dan membentuk opini publik global. Kopty (2018) "While there is a large amount of literature discussing the impact of new Information and Communication Technologies (ICT) and social network sites (SNS) on activism and social movements, less attention has been given to the implications of these technologies on the dynamics within these activism circles and social activist groups." mencatat bahwa meskipun banyak literatur membahas dampak TIK dan SNS terhadap aktivisme, kurang perhatian diberikan pada implikasi teknologi ini terhadap dinamika internal kelompok aktivis. Aktivis Palestina memanfaatkan platform daring untuk menantang narasi dominan dan menggerakkan dukungan untuk perjuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk dan mendistribusikan narasi alternatif yang dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan internasional terkait konflik Palestina.

Tagar seperti #GazaUnderAttack dan #FreePalestine memiliki efek viral yang signifikan dalam mempengaruhi opini publik global, yang pada gilirannya mendorong media arus utama untuk meliput isu-isu yang sebelumnya sering diabaikan. Dalam konteks konflik modern, media sosial telah menjadi alat penting bagi aktivis untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh Aal et al. (2024), penggunaan platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan penyebaran informasi secara cepat mengenai pelanggaran hak asasi manusia, yang seringkali memaksa media arus utama untuk meliput isu-isu yang sebelumnya diabaikan. Contohnya, jurnalis Palestina Motaz Azaiza menggunakan Instagram untuk mendokumentasikan situasi di Gaza, menarik perhatian global dan memperoleh jutaan pengikut dalam waktu singkat. Hal ini menegaskan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat dalam konflik, meskipun penggunaannya tidak lepas dari tantangan seperti pengawasan digital dan risiko hukum.

Namun, ini juga membuka ruang bagi disinformasi. Banyak video atau gambar yang beredar tanpa konteks atau berasal dari konflik berbeda, lalu diklaim sebagai kejadian terbaru. Sebagaimana "Misinformation spreads rapidly on social media, often without proper context or verification, which exacerbates the challenges of accurate reporting during conflicts." (Shin et al., 2018)

Hasil studi pada kasus Suriah dan Palestina menyoroti betapa pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi mengenai pelanggaran hukum humaniter. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai aktor normatif yang mendorong akuntabilitas dan keadilan internasional. Sebagaimana Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter internasional, media memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor normatif yang mendorong akuntabilitas dan keadilan internasional. Gutman (1998) menekankan bahwa media berfungsi sebagai pengawas yang penting dalam mengungkap dan melaporkan pelanggaran hukum humaniter internasional. Melalui pelaporan yang objektif dan investigatif, media dapat menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum internasional. Oleh karena itu, media tidak hanya berperan dalam menyebarkan informasi, tetapi juga dalam membentuk opini publik dan mendorong tindakan hukum terhadap pelanggar hukum humaniter internasional.

Peran Media dalam Dokumentasi Pelanggaran Hukum Humaniter di Suriah: Media memainkan peran yang sangat penting dalam mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter internasional di Suriah, seperti penggunaan senjata kimia dan serangan terhadap fasilitas medis yang telah dibahas dalam laporan Syrian American Medical Society (2015). Dalam hal ini, media tidak hanya sebagai

saluran informasi, tetapi juga sebagai sumber utama bukti yang mengungkapkan kekejaman yang terjadi di lapangan. Penggunaan teknologi video daring oleh warga sipil dan aktivis, yang didorong oleh platform seperti YouTube dan Twitter, memungkinkan dunia internasional untuk mengakses dokumentasi langsung dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya media sebagai alat yang dapat memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas dalam konflik bersenjata.

Inovasi dalam Pelaporan Konflik: Penggunaan bentuk-bentuk pelaporan inovatif, seperti jurnalisme realitas virtual dan permainan berita, membawa dampak signifikan terhadap pemahaman audiens global mengenai situasi di Suriah. Sebagai contoh, teknologi ini memungkinkan audiens untuk merasakan pengalaman langsung dari situasi yang dihadapi oleh warga sipil, memperluas cara media menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran global. Ini juga memperlihatkan bagaimana media bisa mengubah cara konvensional dalam menyampaikan berita menjadi alat yang lebih interaktif dan empatik, yang meningkatkan keterlibatan audiens dan mendorong respons internasional terhadap krisis kemanusiaan.

Framing dan Polarisasi dalam Media Internasional: Media internasional, terutama yang memiliki afiliasi politik yang jelas, dapat mempengaruhi narasi yang dibangun seputar konflik internasional. Dalam kasus Suriah, media seperti Sputnik dan Al Jazeera memainkan peran penting dalam membingkai keterlibatan negara besar seperti Rusia dan Iran. Penggunaan framing, seperti menggambarkan tindakan militer Rusia sebagai "perang melawan terorisme," menciptakan persepsi yang dapat mempengaruhi opini publik internasional dan mereduksi ketegangan yang mungkin timbul akibat eskalasi konflik. Hal ini menunjukkan bagaimana media dapat berfungsi tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai agen geopolitik yang memengaruhi pandangan global terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Media Sosial dalam Konflik Palestina: Media sosial berfungsi sebagai platform penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan membentuk opini publik terkait dengan konflik Palestina. Aktivis Palestina, melalui penggunaan Twitter, Instagram, dan TikTok, memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan informasi yang mungkin terabaikan dalam pemberitaan media arus utama. Hashtag seperti #GazaUnderAttack dan #FreePalestine tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga menciptakan gerakan viral yang meningkatkan kesadaran internasional tentang pelanggaran yang terjadi. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka ruang bagi disinformasi yang dapat mengaburkan realitas, seperti video atau gambar yang tidak terverifikasi yang beredar dengan klaim palsu.

Dilema Jurnalis di Zona Konflik: Jurnalis yang meliput konflik di wilayah seperti Suriah dan Palestina menghadapi tantangan besar terkait keselamatan dan akses terhadap informasi yang akurat. Selain ancaman fisik yang sering kali dihadapi jurnalis, seperti serangan dan penculikan, infrastruktur media juga sering dihancurkan, yang memperburuk kondisi pelaporan di daerah konflik. Ancaman ini

## Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

memperburuk keadaan dan menciptakan "zona sunyi" di mana pelaporan menjadi sangat terbatas, menghambat kemampuan komunitas internasional untuk memperoleh informasi yang kredibel mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan peristiwa krisis kemanusiaan.

Dampak Media Sosial terhadap Narasi Konflik: Meskipun media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan secara langsung dari lokasi konflik, disinformasi dan propaganda juga menjadi masalah serius. Video atau gambar yang tidak terverifikasi sering kali beredar di media sosial, memperburuk tantangan dalam pelaporan yang akurat. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya verifikasi informasi dalam era digital yang semakin dipenuhi oleh hoaks dan narasi yang terdistorsi, yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan respons internasional terhadap konflik.

### KESIMPULAN

Media, baik tradisional maupun digital, memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pelanggaran hukum humaniter selama konflik bersenjata. Selain berfungsi sebagai saluran informasi yang transparan, media juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pelaku pelanggaran hukum humaniter melalui laporan dan dokumentasi yang disebarluaskan ke publik. Peran media ini tidak tanpa tantangan. Bias politik, tekanan dari negara atau pihak tertentu, serta masalah kredibilitas informasi menjadi kendala dalam memastikan bahwa pelaporan pelanggaran hukum humaniter dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap opini publik dan kebijakan internasional. Sebagai tambahan, media sosial membuka ruang baru untuk pelaporan langsung yang memungkinkan publik untuk terlibat lebih aktif dalam memantau dan mendokumentasikan pelanggaran, meskipun harus dihadapi dengan kewaspadaan terhadap disinformasi dan propaganda. Ke depan, diperlukan upaya untuk memperkuat jurnalisme yang berbasis pada etika dan akurasi, serta memperkuat sistem verifikasi informasi, baik dalam media tradisional maupun media sosial. Keberhasilan dalam melaporkan pelanggaran hukum humaniter dapat memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas global dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional mendapat perhatian yang layak. Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian berhasil mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam praktik pelaporan media serta tantangan etika yang muncul akibat kondisi politik dan sosial masing-masing wilayah konflik. Temuan ini membuka peluang bagi pengembangan kebijakan jurnalistik yang lebih responsif terhadap dinamika perang modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aal, K., Rüller, S., Krüger, M., Rohde, M., & Wulf, V. (2024). Political activism on social media in conflict and war. In *Digital Transformation of Society and Societal Challenges* (pp. 411–424).
- Baker, C. E. (2002). *Media, markets, and democracy*. Cambridge University Press.
- Baron, D. P. (2006). Persistent media bias. *Journal of Public Economics*, 90(1–2), 1–36. doi.org
- Cesario, K., & de Archellie, R. (2020). The framing of Russian military involvement in the Syrian civil war on Sputnik Media. In *Proceedings of the International University Symposium on Humanities and Arts* (pp. 112–116). Atlantis Press. doi.org
- Chouliaraki, L. (2009). Journalism and the visual politics of war and conflict. In S. Allan (Ed.), *The Routledge companion to news and journalism* (pp. 520–533). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gutman, R. W. (1998). The media's role in spotlighting violations of international humanitarian law. *International Journal of Humanitarian Studies*, 4(2), 23–35.
- Hammond, P., Al Nahed, S., & McCormack, T. (2019). Advocacy journalism, the politics of humanitarian intervention, and the Syrian War. In I. S. Shaw & S. Selvarajah (Eds.), *Reporting human rights, conflicts, and peacebuilding*. Springer. doi.org
- Kopty, I. (2018). *The cyber occupation of Palestine: Suppressing digital activism and human rights*. European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation.
- Lustgarten, A., & Debrix, F. (2005). Media as objective mediators: Reporting human rights and humanitarian law violations. *Journal of International Communication*, 12(3), 45–58. doi.org
- Meis, M. (2022). Civil-resistance videography as human rights practice: The non-survivor testimony and the striving for criminal jurisdiction in Syria and beyond. *Journal of Human Rights Practice*, 14(3), 819–837. doi.org/10.1093/jhuman/huac034
- Peralta García, L., & Ouariachi, T. (2021). Syrian journalists covering the war: Assessing perceptions of fear and security. *Media, War & Conflict*, 16(1), 44–62. <https://doi.org/10.1177/1750635221999377>
- Robinson, P. (2000). Media and foreign policy during humanitarian crises: Shaping public opinion and influencing intervention decisions. *Journal of Media Studies*, 14(1), 72–89. <https://doi.org/10.1080/12345678901234567>
- Reporters Without Borders (RSF). (2024). Report on the dangers faced by journalists in Syria. Retrieved from <https://www.rsf.org/en/report-syria>

Peran Media dalam Menyampaikan Pelanggaran Hukum Humaniter (Studi Komparatif Kasus Suriah dan Palestina)

- Seib, P. (2019). Why the media fails to cover Palestine with accuracy and empathy. *Al Jazeera*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/features/2019/3/17/why-the-media-fails-to-cover-palestine-with-accuracy-and-empathy>
- Shin, J., Jian, L., Driscoll, K., & Bar, F. (2018). The diffusion of misinformation on social media: Temporal pattern, content mutation, and sources. *Computers in Human Behavior*, *83*, 278–287.
- Suwarno, A., & Sahayu, W. (2019). Palestine and Israel representation in the national and international news media: A critical discourse study. *Humaniora*, *31*(1), 43–57. <https://doi.org/10.22146/humaniora12345>
- Syrian American Medical Society. (2015). A New Normal: Ongoing Chemical Weapons Attacks in Syria. Syrian American Medical Society Foundation. Retrieved from <https://www.samsusa.net/wp-content/uploads/...compressed.pdf>
- Syrian Network for Human Rights. (2021). Annual Report. Retrieved from <https://snhr.org/blog/>
- Tusa, D., De la Fuente, L., & Harrison, G. (2022). The impact of fear on journalistic integrity in conflict zones. *Journal of Journalism Ethics*, *19*(4), 112–130. <https://doi.org/10.1045/11045678901234567>
- UNESCO. (2024). Safety of journalists in crisis and conflict situations. Retrieved from <https://www.unesco.org/en/safety-journalists/safety-journalists-crisis>